

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

INDAH MAWARNI PUTRI

C 100060044

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

INDAH MAWARNI PUTRI


C100060044

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I,


Septarina Budiwati, S.H., M.H.
NIK. 244

Pembimbing II,


Wardah Yuspina, S.H., M.Kn.
NIK. 1001053

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

OLEH

INDAH MAWARNI PUTRI

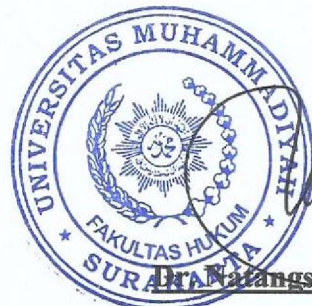
C100060044

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 18 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Nuswardhani, S.H., M.S
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()



Dekan,



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Agustus 2016

Penulis



INDAH MAWARNI PUTRI

C 100060044

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

**INDAH MAWARNI PUTRI
C 100060044**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2016**

ABSTRACTS

This research aims to know: (1) rights of widow in the implementation of inheritance distribution according to Javanese customary law, (2) basis of consideration of judges on the rights of widow in inheritance distribution according to customary law at the State Court of Sukoharjo. This research is a normative with a qualitative approach. The data obtained from State Court of Sukoharjo. Data were collected through documents research and interviews. Technical data analysis used qualitative analysis with interactive model. The results shows that: (1) The distribution of inheritance according to Javanese customary law implemented based on the acquisition of such property during marriage. (2) basis of consideration of judges on the rights of widow in inheritance distribution according to customary law at the State Court of Sukoharjo are (a) if widow do not have children, then there are two alternatives, are: (1) first settlement: congenital treasure back to the origin, because the widow is not entitled to inherit, and property acquired jointly during marriage controlled entirely by widows during life or during her unmarried with another man. (2) second settlement: congenital treasure back to the origin, and property acquired jointly during marriage directly divided into two. (b) If the marriage have been blessed with children, widow inheritance on inheritance allied with children.

Keywords: rights of widow, inheritance, javanese customary law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hak janda dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Jawa, (2) dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat di PN Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum ada Jawa, dilaksanakan berdasarkan perolehan harta tersebut selama perkawinan (2) Dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat di PN Sukoharjo adalah (a) bila janda tidak memiliki anak, maka ada dua alternative penyelesaian, yaitu: (1) penyelesaian pertama: harta gawan kembali keasal, sebab janda tidak berhak mewarisi, dan harta gono-gini dikuasai seluruhnya oleh janda selama hidup atau selama dia belum kawin dengan laki-laki lain. (2) penyelesaian kedua: harta gawan kembali ke asal, dan harta gono-gini langsung dibagi dua. (b) Apabila dari perkawinan tersebut dikaruniai anak, kewarisan janda atas harta waris bersekutu dengan anak-anak.

Kata Kunci: hak janda, warisan, hukum adat Jawa.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga sistem hukum waris. Ketiga sistem hukum waris itu adalah, sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam.¹ Menurut Kamaruddin, Asas hukum bersifat umum dan abstrak, maka pada umumnya tidak dituangkan atau diterapkan langsung pada peristiwa konkrit. Hanya saja dalam mencari asas-asas hukum dapat dicari pada sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit.² Asas hukum kewarisan menurut hukum adat berasal dari cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.³

Sistem kewarisan menurut hukum adat dipengaruhi bentuk susunan masyarakat adat. Sistem kewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatannya yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam yaitu sistem patrilineal, matrilineal, maupun parental/birateral.⁴

Menurut Susylawati, janda selain memperoleh setengah dari harta bersama perkawinan, juga memperoleh bagian warisan dari harta bersama almarhum suaminya. Malahan menurut hukum adat di Jawa, apabila dalam perkawinan tidak ada anak, maka harta gono-gini akan beralih seluruhnya kepada janda. Dengan

¹ Wery Gusmansyah, 2013, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Manhaj*, Vol. 1, Nomor 2, Mei – Agustus, hal 153.

² Kamaruddin, 2013, *Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*. Al-Risalah, Volume 13, Nomor 1, Mei, hal 23.

³ Hilman Hadikusumo, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 6

⁴ *Ibid*. Hal.13

demikian janda terhadap harta bersama memperoleh dari dua sumber yaitu dari hak bagiannya sendiri dan hak waris dari harta bersama suaminya.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak janda dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Jawa?, dan (2) Apa dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat di PN Sukoharjo?

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Adapun analisisnya menggunakan analisis normatif kualitatif.⁶

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer⁷ yang diperoleh melalui penelitian pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari perundang-undangan dan buku literatur yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*).

⁵ Susylawati, 2009, Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Parental. *Al-Hikam*, Vol. IV, No. 2, hal. 267-268.

⁶ M. Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum: Penelitian Hukum Empirik/ Nondocrinal dan Analisis Statistik*. Surakarta: Unesa University Press, hal. 17.

⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, hal. 137.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Janda dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2016 dengan Boxgie Agus Santosa menjelaskan,⁸ kedudukan janda/isteri terhadap harta peninggalan suami yakni setelah meninggalnya suami, janda/isteri mempunyai peran menjadi kepala rumah tangga sehingga harta yang ditinggalkan sepenuhnya untuk janda/isteri dan apabila setelah harta tersebut diserahkan kepada janda/isteri seluruh hak dan kewajiban dari suami itu menjadi tanggung jawab janda/isteri, sehingga janda/isteri tersebut mempunyai kewajiban membiaya kehidupan anak-anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika janda/isteri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya masih kecil maka harta peninggalan suami tadi diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk biaya kehidupan anak-anaknya yang masih kecil. Setelah anak tersebut dewasa maka harta yang diserahkan kepada kedua keluarga kedua belah pihak tadi harus diserahkan kepada anak tersebut dengan pembagian yang sama rata antara anak tersebut. Namun lain halnya apabila janda/isteri yang ditinggalkan tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut maka harta peninggalan suami untuk janda/isteri diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak dengan diketahui oleh kepala desa dan tokoh adat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 Februari 2016 dengan Widiyanto menjelaskan,⁹ bahwa dalam pembagian harta terhadap harta peninggalan suami, terhadap kedudukan janda/isteri terhadap harta peninggalan

⁸ Boxgie Agus Santoso, Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 25 Februari 2016, Pukul 10.22 WIB.

⁹ Widiyanto, Bagian Kepaniteraan Hukum PN Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 25 Februari 2016, Pukul 11.14 WIB.

suami pembagian harta tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga serta diketahui oleh kepala desa dan Tokoh Adat Jawa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 Februari 2016 dengan Widiyanto menjelaskan,¹⁰ kedudukan janda/isteri setelah suami meninggal dunia maka janda/isteri mempunyai tugas sebagai kepala rumah tangga, sehingga harta dari perkawinan tersebut beralih menjadi kepemilikan janda/isteri, tujuan harta tersebut dialihkan sepenuhnya kepada janda/isteri untuk biaya kehidupan janda/isteri dan anak-anaknya dan apabila janda/isteri tersebut meninggal dunia harta peninggalan suami dialihkan untuk anak-anak yang ditinggalkan.

Menurut sifatnya harta peninggalan suami terhadap janda/isteri menurut Hukum Adat Jawa di Kabupaten Sukoharjo merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Oleh sebab itu hendaknya terhadap harta peninggalan suami terhadap janda/isteri menurut Hukum Adat Jawa memperhatikan hal penting dalam hukum adat waris seperti dalam hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan misalnya parental dan dasar pembagian warisan yakni kerukunan

¹⁰ Widiyanto, Bagian Kepaniteraan Hukum PN Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 25 Februari 2016, Pukul 11.22 WIB.

dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan dari tiap ahli waris serta adanya persamaan hak para ahli waris.

Hukum adat tidak mensyaratkan kematian si pewaris, karena hukum adat memandang warisan sebagai suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik materiil dan immateriil dari generasi ke generasi. Harta benda yang berbentuk immateriil, tidak perlu si pewaris mati dahulu agar dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Harta kekayaan itu sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat si pewaris masih hidup.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Giyono juga menjelaskan,¹² bahwa terhadap harta peninggalan suaminya, ada juga janda/isteri yang mendapatkan jaminan hidup sampai dia meninggal, semua ditanggung oleh anaknya, karena anak laki-laki mendapatkan sepenuhnya sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan seikhlasnya dari anak laki-laki. Adat seperti ini tidak bisa ditinggalkan walaupun merantau karena sudah bawaan dari lahir, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu terhadap peninggalan suami tadi lebih memilih hukum adatnya yaitu Hukum Adat Jawa karena merasa sebagai orang Jawa, serta adanya kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak untuk melakukan pembagian harta peninggalan menggunakan Hukum Adat Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kedudukan janda/isteri terhadap harta peninggalan suami dapat disimpulkan menganut sistem kewarisan individual. Sebab sesuai dengan teori sistem kewarisan hukum adat yakni sistem kewarisan

¹¹ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 319.

¹² *Op.Cit.* Tanggal 25 Februari 2016.

individual, sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perseorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta waris dibagi-bagikan diantara ahli waris.¹³

Menurut pandangan peneliti hak janda dalam pelaksanaan warisan menurut hukum adat Jawa harus mendapat perhatian oleh masyarakat. Peneliti sepakat dengan penjelasan Boxie Agus Santoso yang menyatakan bahwa janda harus diberikan hak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya, sehingga janda dapat membiayai kehidupan di masa mendatang. Apalagi bila janda tersebut masih harus menanggung beban kehidupan anak-anaknya hasil perkawinan dengan almarhum suami.

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Janda dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat di PN Sukoharjo

Di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat dua kasus yang bisa dipelajari, yang mana kasus tersebut dapat semakin memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti penulis.

Kasus pertama yaitu Penetapan PN. Sukoharjo nomor: 52_Pdt.P_2007_PN.Skh dan 70_Pdt.P_2009_PN.Skh, terkait dengan permohonan izin menjual tanah warisan yang telah dibagikan kepada anaknya. Kedua kasus merupakan kasus janda yang ditinggal mati suaminya sehingga mengalami kesulitan hidup untuk kelangsungan hidup selanjutnya, sementara warisan peninggalan suaminya tidak dapat digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Berikut fakta kejadian terkait pembagian hak waris adat di PN Sukoharjo.

¹³ Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hal.313

Pertama, Penetapan PN. Sukoharjo nomor: 52_Pdt.P_2007_PN.Skh. Ahli waris yang disebut berdasarkan permohonan di atas, hanya ada 2 orang yaitu Elliyani dan Tedy Yudha Wiwoho. Bagian atas harta warisan untuk Elliyani menurut adat Jawa adalah $\frac{3}{4}$ dan Tedy Yudha Wiwoho $\frac{1}{4}$ dari seluruh luas lahan. Atas keputusan PN tersebut akhirnya Elliyani memiliki kekuatan hukum untuk menjual harta warisan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak janda dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Jawa, sebagaimana ilustrasi kasus Lelliyani, adalah: (1) menurut adat Jawa, seorang janda dengan 1 orang anak mendapatkan hak waris atas peninggalan suaminya. (2) menurut adat Jawa, janda berhak mendapat bagian $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh luas tanah harta warisan. Janda dengan ijin Pengadilan Negeri dapat menjual harta warisan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan untuk membiayai anak, dapat menjual harta warisan meskipun ahli waris anak masih berusia di bawah umur 18 tahun.

Kedua, Penetapan PN. Sukoharjo nomor: 70_Pdt.P_2009_PN.Skh. Kasus Lelliyani jelas disebutkan bahwa selama perkawinan antara Lelliyani dengan Handoko Wiwoho telah membeli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor sekian-sekian. Artinya ada harta gono-gini dalam perkawinan tersebut. Kasus Sri Suparni tidak disebutkan peninggalan tanah tersebut diperoleh selama perkawinan mereka, sehingga harta tersebut merupakan harta bawaan dari suami Sri Suparni yang menikahinya dengan status duda beranak satu, makanya tanah itu hanya dibagikan kepada kedua anaknya. Anak dari bawaan dengan istri sebelumnya dan anak hasil perkawinan dengan Sri Suparni, sehingga janda Sri

Suparni tidak mendapat hak warisan dari suami. Menurut penuturan Boxgie Agus Santosa, Sehubungan dengan hak dan kedudukan janda atau duda untuk saling mewaris terhadap harta bersama, hukum adat Jawa telah menentukan tata cara penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan Boxgie Agus Santosa, hak janda dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Jawa sepanjang yang dialami Sri Suparni tidak mendapat hak waris, karena harta warisan peninggalan suaminya tidak diperoleh selama masa perkawinannya. Harta tersebut merupakan harta bawaan suami yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Namun sebagai janda Suparni berhak atas kelayakan hidupnya sebagaimana kelangsungan hidupnya saat suaminya masih hidup.

Menurut pandangan peneliti dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat telah mengacu pada kesamaan hak dan keadilan bagi janda dan keluarga yang ditinggal oleh almarhum suami. Pemberian ijin serta terkabulnya permohonan pemohon sudah sepantasnya diberikan janda almarhum Handoko Wiwoho dan janda almarhum Sri Suparni. Pada kasus janda almarhum Handoko harus diberikan agar janda Handoko dapat membiayai sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara janda Sri Suparni perlu diberikan hak waris janda agar dapat membiayai anak dengan almarhum suaminya untuk berobat karena sakit.

Bagi masyarakat adat khususnya Jawa Tengah yang berstelsel kekerabatan parental, pada awalnya janda bukan ahli waris almarhum suaminya, namun berhak hidup dari harta keluarga peninggalan almarhum suaminya. Sistem kekerabatan

parental menempatkan kedudukan yang sama dan bertimbal balik antara suami istri untuk saling mewaris dalam kedudukan mereka sebagai janda atau duda. Jangkauan hak mewaris janda atau duda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta gono-gini saja. Tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami isteri, hanya yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Dianggap harta gawan, harta ini tidak termasuk kategori harta waris janda atau duda.

Sehubungan dengan hak dan kedudukan janda atau duda untuk saling mewaris terhadap harta bersama. Hukum adat Jawa telah menentukan tata cara penyelesaiannya.

Terlihat adanya perbedaan pemberian harta waris bagi janda dalam hal tidak ada anak. Janda bisa mewaris sepenuhnya atas harta gono-gini, bisa juga tidak mewaris apabila hanya sebatas $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain jatuh ke ahli waris almarhum suami. Dalam hal ada anak, janda selain berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini ini juga masih ditambah dengan hak janda sebesar bagian seorang anak atas $\frac{1}{2}$ dari harta gono gini yang masih tersisa. Dengan demikian dalam hal ada anak, terlihat bahwa janda memiliki hak atas harta waris. Tetapi apabila hanya dengan memperhatikan sekedar pendapat di atas, belum bisa ditarik kesimpulan yang pasti akan bagaimana hukum waris adat Jawa mengenai hak seorang janda untuk daerah janda karena masih ditemukan adanya perbedaan kemungkinan bagi janda dalam kewarisan.

Janda hanya memiliki hak untuk menikmati harta gono-gini, sedangkan harta asal suami (almarhum) lazimnya kembali kepada keluarga suami, jika harta

gono-gini sudah mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup janda. Dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat di PN Sukoharjo, sebagaimana pertimbangan hakim dalam kasus di atas adalah: (1) Harta peninggalan suami menjadi hak penuh Istri/janda untuk membiaya kehidupan anak-anaknya yang masih menjadi tanggungannya, baik dalam kasus Elliyani maupun Sri Suparni, meskipun harta tersebut telah diwariskan kepada anaknya. (2) Istri/janda (pemohon Elliyani) memerlukan biaya untuk sekolah anaknya ke jenjang lebih tinggi demi masa depan anaknya. (3) Istri/ janda (pemohon Elliyani maupun Sri Suparni) memerlukan biaya untuk sekolah anaknya ke jenjang lebih tinggi demi masa depan anaknya. Sri Suparni juga memerlukan untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum ada Jawa, dilaksanakan berdasarkan perolehan harta tersebut selama perkawinan. Berikut pelaksanaan pembagian warisan:

Kasus janda tanpa anak terjadi antara Sri Suparni dan Surono. Pada kasus ini, anak bawaan dalam pernikahan berasal dari sang suami. Pembagian warisan dengan keberadaan anak bawaan, warisan dari perkawinan sebelumnya tidak diwariskan kepada janda. Harta warisan setelah perkawinan terakhirnya dibagikan kepada anak bawaan dan anak selama perkawinan terakhir tersebut.

Kasus janda dengan anak terjadi antara Handoko Wiwoho dengan Lelliyani. Selama perkawinan dari perkawinan yang sah lahir anak laki-laki dengan nama Tedy Yudho Wibowo. Suami kemudian meninggal dan

meninggalkan harta warisan tanpa melakukan pembagian warisan. Selama menjalani kelangsungan hidupnya janda Lelliyani kesulitan biaya pendidikan sehingga bermaksud melakukan penjualan tanah warisan. Janda perlu mengajukan izin menjual karena secara hukum anak juga memperoleh warisan. Pada pengajuan izin penjualan tanah warisan ada $\frac{3}{4}$ hak janda dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk anak, dan pengadilan memberikan ijin.

Kedua, dasar pertimbangan hakim terhadap hak janda dalam pembagian waris menurut hukum adat di PN Sukoharjo, bila janda tidak memiliki anak, maka ada dua alternative penyelesaian, yaitu: (1) Penyelesaian pertama: (a) Harta gawan kembali keasal, sebab janda tidak berhak mewarisi, (b) Harta gono-gini dikuasai seluruhnya oleh janda selama hidup atau selama dia belum kawin dengan laki-laki lain. Menurut penyelesaian ini, tidaklah menjadi soal apakah harta gono-gini kecil atau besar jumlahnya. Hak ahli waris suami baru terbuka apabila janda meninggal dunia atau kawin lagi. (2) Penyelesaian kedua: (a) Harta gawan kembali ke asal, (b) Harta gono-gini langsung dibagi dua: (1) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila ia meninggal dunia, dan (2) $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak mendiang suami jatuh menjadi harta waris para ahli waris mendiang suami. Apabila dari perkawinan tersebut dikaruniai anak, kewarisan janda atas harta waris bersekutu dengan anak-anak dengan ketentuan: (a) Harta gawan menjadi hak waris bagi anak-anak. Terhadap harta gawan mendiang suami, janda tidak ikut bersekutu untuk mewarisi. Harta tersebut mutlak menjadi hak waris anak-anaknya, (b) Mengenai harta gono-gini. Sepanjang mengenai harta gono-gini dijumpai tiga penyelesaian

paling dominan, yaitu: (1) Harta gono-gini tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin dengan laki-laki lain. Baru dapat dilakukan pembagian setelah ia meninggal atau kawin lagi dengan laki-laki lain, (1) Harta gono-gini tetap utuh dikuasai janda, terbatas sampai anak-anak dewasa. Apabila semua anak-anak dewasa, harta gono-gini dibagi, (3) Harta gono-gini langsung dibagi: (a) $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak penuh janda, dan (b) $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta waris bagi seluruh anak bersama janda dengan pembagian yang sama. Dalam hal ini besaran bagian janda sama dengan bagian seorang anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, dalam menyelesaikan pembagian warisan khususnya mengenai warisan bagi janda yang biasanya para pihak masih mempunyai hubungan darah atau keluarga, sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli hukum, sehingga kelangsungan hidup janda tidak disia-siakan setelah suaminya meninggal dunia

Kedua, bagi pihak pengadilan khususnya majelis hakim diharapkan lebih semangat dalam memberikan sosialisasi hukum terkait dengan pembagian hak waris janda, sehingga keadilan bagi kelangsungan hidup janda tidak menjadi lebih buruk dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum: Penelitian Hukum Empirik/ Nondoctrinal dan Analisis Statistik*. Surakarta: Unesa University Press.
- Gusmansyah, Wery. 2013. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". *Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2013.
- Hadikusuma, Hilman. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kamaruddin. 2013. Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris. *Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samosir, Djamanat. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susylawati, Eka. 2009. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Al-Hikam*, Vol. IV, No. 1 Juni 2009.
- Susylawati, Eka. 2009. "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental". *Al-Hikam*, Vol. IV No. 2 Desember 2009, hal. 257-274.
- Thalib, Sajuti. 2004. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfiana, U., Suryaningrum, C., Anwar, Z. 2012. Menjanda Pasca Kematian Pasangan Hidup. *Journal Online Psikologi*, Vol. 1, No.1, Mei 2012.